

Evaluasi Penanganan Banjir di Jeneponto

Vol 5 Issue 2
(Oktober, 2021)

Ansyari Mone¹, Hardianto Hawing², Muh Ichwan³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas
Muhammadiyah Makassar

Email: Ansyari@gmail.com¹, Hardiantohawing@gmail.com²,
muhichwan434@gmail.com^{3*}

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

Keywords:

Jeneponto; Flood Management;
Policy;

How to Cite:

APA Style 7th



ABSTRACT

This study aims to determine the results of the Evaluation of Government Policies in Flood Management in Jeneponto Regency through regional regulation no 2 of 2013 concerning the establishment of the Regional Disaster Management Agency (BPBD). The research model used is descriptive qualitative. The instruments that will be used in this research are observation, interviews and documentation to describe and explain the evaluation of government policies in flood management in Jeneponto Regency. The informants and research included Secretary of BPBD Jeneponto, Head of Section for Reconstruction of BPBD Jeneponto, Community Leaders of Sapanang Village. The data obtained from the research results were examined using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the evaluation of Government Policy in Flood Management in Jeneponto Regency. There are three indicators that the author uses in this study, namely: (1) Effectiveness, (2) Efficiency (3) responsiveness

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>
Copyright (c) 2021 by IJGCS

1. Pembahasan

Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa. Secara geografis Indonesia merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Hal ini disebabkan oleh letak geografis (Anggita, 2020).

Bencana alam adalah salah satu fenomena yang dapat terjadi setiap saat, dimanapun dan kapanpun sehingga menimbulkan risiko atau bahaya terhadap kehidupan manusia, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia. (Saragih, 2016). Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggunya, bahkan terhentinya. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata, terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi sarana publik yang rusak (Nurhaimi, 2014).

Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu pengukuran adalah membandingkan hasil tes dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran bersifat kuantitatif. Evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan 26 melalui kegiatan asesmen (Kumano 2001). Evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk

membuat alternatif-alternatif keputusan (Abdullah 2014). Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai (Purwanto 2002).

Philips dan Homark dalam (Zakky, 2019) mendefinisikan evaluasi adalah suatu istilah yang kompleks dimana didalamnya memuat pembuatan keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian tujuan suatu program. Keputusan ini bisa didasarkan data kuantitatif maupun data kualitatif. Selanjutnya Lewhman (1990) dalam (Zakky, 2019) berpendapat bahwa evaluasi dapat diketahui berdasarkan pada tujuannya, terdapat dua jenis evaluasi yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah yang dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh *feedback* perbaikan program, sementara evaluasi sumatif adalah upaya untuk menilai manfaat dari suatu program dan mengambil keputusan.

Dunn dalam (Gustiance, 2019) evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi berhubungan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan dan memberi informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja dari suatu kebijakan.

Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut (Ramdhani, 2017).

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan dapat juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting suatu instansi/organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemeliharannya berdasarkan dampaknya. Dalam hal ini kebijakan merupakan hal yang paling utama untuk dijadikan pedoman dasar dalam penanggulangan bencana alam agar permasalahan yang sering terjadi dengan mengacu terhadap kebijakan yang telah ditentukan maka dapat meminimalisir bencana alam itu (Widayanto, 2018).

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang sering mengalami bencana banjir. Bahkan banjir sudah menjadi bencana yang berapa kali melanda Kabupaten Jeneponto. Padahal ketika dilihat dari segi geografi daerah Jeneponto seharusnya menjadi daerah yang sulit untuk dilanda bencana banjir karna berada didaerah yang cukup tinggi dan memiliki cuaca atau iklim yang panas dan daerah Jeneponto juga dikenal dengan daerah kering. Tapi keadaan tersebut tidak menjadi jaminan bahwa Jeneponto akan aman dari banjir terbukti 3 tahun terakhir yaitu ditahun 2018 samapai 2020 jeneponto dilanda bencana banjir berturut turut dimana puncak banjir tersebut ditahun 2019 yang memakan korban jiwa sebanyak 15 orang meninggal dan rumah hancur sebanyak 644 rumah.

Pemerintah Jeneponto sebenarnya telah mengeluarkan aturan terkait kebencanaan yang dimana itu tercantum dalam Perda No 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencan Daearah (BPBD) Jeneponto. Dengan lahirnya perda ini menjadi harapan bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri karna sudah ada instansi yang bertugas dalam penanganan bencana (Banjir) ketika terjadi di Jeneponto. Namun perda ini dibuat ditahun yang dimana daerah Jeneponto sedang dalam keadaan yang stabil dan tidak ada bencana seperti banjir sehingga perda ini belum bisa di evaluasi dari segi kinerja karna ini berhubungan dengan pembentukan sebuah instansi. Kemudian perda No 2 tahun 2013 ini yang menjadi kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir karna perda tersebut berkenaan dengan pembentukan BPBD yang secara otomatis menajdi isntasi yang menangani persoalan banjir, ditahun 2019 awal perda ini diuji dengan bencana banjir yang melanda Jeneponto dimana kinerja dari BPBD dilihat secara langsung apakah sudah efektif, efesien dan responsif dalam menghadapi banjir tersebut

baik pada saat sebelum banjir, saat banjir dan setelah banjir. Sejak lahirnya kebijakan tersebut sudah ada beberapa program yang telah dikerjakan oleh BPBD Jeneponto diantaranya adalah pembagian sembako kepada korban banjir yang terjadi di tahun 2019 di beberapa desa di Jeneponto, pembangunan tanggul sungai di Desa Sapanang, Rekonstruksi Jembatan Munte dan kolaborasi pendampingan relawan BPBD, BNPB dan Pusat penanganan Banjir Unhas. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan memfokuskan penelitian ini pada: “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten Jeneponto”.

2. Metode

Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan setelah seminar proposal mengenai Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten Jeneponto.

Yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian kualitatif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang sedang diteliti, mengidentifikasi serta menjelaskan data yang ada secara sistematis. Menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengetahui apa-apa saja yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisa serta menginterpretasikan kondisi yang terjadi saat ini.

Sumber data penelitian ini yaitu: pertama, data primer yaitu data empiris yang didapatkan peneliti dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah bagaimana Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten Jeneponto serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi skripsi, kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu: (1) teknik observasi artinya pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, (2) teknik wawancara artinya usaha teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan yang dipilih, (3) teknik dokumentasi artinya cara pengumpulan data dan telah pustaka dimana dokumendokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan teknik pengabsahan data terdiri dari: pertama, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas terhadap data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kedua, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbedadan ketiga, triangulasi waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data maka dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Teknik analisis data sebagai berikut: (1)Reduksidata artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, lebih focus pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. (2) Penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. (3) Penarikan kesimpulan menarik hal-hal pokok atau penting yang menjadi hasil dari penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang sering mengalami bencana banjir. Bahkan banjir sudah menjadi bencana yang berapa kali melanda Kabupaten Jeneponto. Adapun kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam penanganan banjir yang terjadi di Kabupaten Jeneponto adalah dengan mengeluarkan Perda No 2 Tahun 2013 pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dimana dalam maksud dari pembentukan BPBD ini memberikan solusi atau program program yang mampu meminimalisir terjadinya banjir baik itu sebelum banjir, saat banjir dan setelah banjir.

Sejak lahirnya kebijakan tersebut sudah ada beberapa program yang telah dikerjakan oleh BPBD Jeneponto diantaranya adalah pembagian sembako kepada korban banjir yang terjadi di

tahun 2019 di beberapa desa di Jeneponto, pembuatan tanggul sungai di Desa Sapanang rekonstruksi jembatan munte dan kolaborasi pendampingan relawan BPBD, BNPB dan Pusat *study* penanganan Banjir Unhas.

Kemudian konsep yang dibuat dalam mengevaluasi sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemda Jeneponto yaitu Perda No 2 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah: (1) Efektifitas, (2) Efisiensi, (3) Responsivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai. Dan dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan Efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bersama dengan beberapa informan terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Jeneponto dimana pemerintah sudah mengeluarkan aturan terkait penanganan bencana dalam hal ini banjir yaitu Perda No 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dimana dengan dikeluarkannya aturan tersebut secara otomatis dapat menjadi upaya pemerintah dalam penanganan bencana banjir yang terjadi di Jeneponto meskipun banyak hambatan yang dialami oleh BPBD sendiri tapi semua itu tetap diupayakan agar ketika terjadi banjir itu sudah diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Perda No 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Penanggulan Bencana Daerah Jeneponto sudah berjalan dengan efektif karna tugas dan fungsi dari BPBD sudah dilaksanakan dengan cukup baik dalam penanganan banjir yang terjadi di Jeneponto meskipun masih banyak kekurangan dari perda ini tapi setidaknya dengan lahirnya perda tersebut membuat persoalan bencana sudah ada instansi yang fokus menangani kebencanaan, serta pemerintah juga harus terus melakukan pengawasan dan komunikasi dengan BPBD terkait apa yang harus dipenuhi untuk penanganan banjir.

William N. Dunn dalam (Gustiance, 2019) Efisiensi yang merupakan sinonim dari dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Efisiensi anggaran sangat berpengaruh terkait ketika ingin mengevaluasi kebijakan seperti yang dilakukan peneliti menemukan data bahwa kebijakan atau perda yang dikeluarkan pemda Jeneponto terkait pembentukan BPBD itu cukup berjalan baik tapi masih juga mempunyai hambatan atau kekurangan seperti anggaran yang tidak cukup banyak yang diberikan pemerintah Jeneponto pada BPBD padahal ada beberapa program BPBD yang membutuhkan anggaran yang lebih tapi belum diberikan oleh pihak pemerintah.

William N. Dunn dalam (Gustiance, 2019) mendefinisikan bahwa Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Kemampuan dilihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Responsivitas ditujukan untuk mengetahui hasil rencana, kebijaksanaan sesuai dengan preferensi, keinginan dari target. Responsivitas sebagai salah satu indikator dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur negara terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana yang di atur dalam perundang undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama informan diatas terkait dengan bagaimana Responsivitas dijadikan sebagai indikator dalam Evaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di Jeneponto itu ada dua pandangan, pandangan pertama jika dilihat dari sudut pandang mengatakan bahwa pemerintah memang sudah responsif karna sudah mengeluarkan

perda no 2 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jeneponto dimana dampak positifnya adalah sudah ada instansi yang mengurus ketika terjadi bencana seperti banjir jadi pemerintah sudah responsif dalam melihat persoalan sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa responsivitas dari pemerintah dalam melihat persoalan masih kurang karena pemerintah hanya sampai pada mengeluarkan perda setelah itu terkesan acuh lagi karena Pemerintah Jeneponto menganggap bahwa banjir bandang sulit menimpa daerah tersebut karena daerah Jeneponto itu didataran tinggi dan sering terjadi kekeringan namun semua itu terbantahkan karena banjir sudah 3 tahun terakhir sudah melanda daerah Jeneponto puncaknya tahun 2019 yang banyak memakan korban dan merusak fasilitas umum.

4. Kesimpulan

Disimpulkan Evaluasi kebijakan penanganan banjir yang menggunakan pendekatan Efektifitas dalam mengevaluasi sebuah kebijakan itu sudah berjalan cukup baik karena peran dari Perda No 2 Tahun 2013 dalam hal ini BPBD dan fungsi dari BPBD sudah dilaksanakan dengan cukup baik dalam penanganan banjir yang terjadi di Jeneponto meskipun masih banyak kekurangan dari perda ini tapi setidaknya dengan lahirnya perda tersebut membuat persoalan bencana sudah ada instansi yang fokus menangani kebencanaan, serta pemerintah juga harus terus melakukan pengawasan dan komunikasi dengan BPBD terkait apa yang harus dipenuhi untuk penanganan banjir.

Dapat disimpulkan bahwa Efisiensi dalam hal anggaran sangat berpengaruh terkait ketika ingin mengevaluasi kebijakan seperti yang dilakukan peneliti menemukan data bahwa kebijakan atau perda yang dikeluarkan pemda Jeneponto terkait pembentukan BPBD itu cukup berjalan baik. Dari ketidaksiapan dan responsivitas yang kurang dimiliki pemerintah Jeneponto maupun BPBD inilah dalam menghadapi banjir sehingga akhirnya kewalahan dalam menangani banjir ditahun 2019 yang membuat banyak korban dan kerusakan yang dialami masyarakat. Berdasarkan hasil penjelasan dapat disimpulkan bahwa Responsivitas dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemda Jeneponto yaitu perda No 2 Tahun 2013 kurang maksimal dan harus diperbaiki apa apa yang menjadi kekurangan dalam penanganan banjir.

Acknowledgment

Terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing dan seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar atas selesainya artikel kami, karena selama ini telah menasehati, membantu dan mengajari penulis.

References

- Anggita, A. S. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir di Kabupaten Gresik . *Jurnal Syntax Idea* , Vol.2 No.5.
- Anggita, S. A. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir di Kabupaten Gresik. *Jurnal Syntax Idea*., Vol.2, No.5.
- Anggraeni, R. d. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 1.
- Aswad, H. (2018). Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Imigran Di Kota Makassar.

- Herdini, F. d. (2020). Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Menangani Keluhan Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nganjuk. *Public Administration Journal Of Research*, Vol.2, No.1.
- Juniarta, W. (2019). Responsivitas Kebijakan Lokal Dalam Menghadapi Dinamika Sosial. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.3, No.1.
- Kawengian, D. D. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (TRAFFICKING) Terutama Perempuan Dan Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Acta Diurna*, Vol. IV, No. 5.
- Muhiddin, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik.
- Murdiyanto. (2015). Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor dan Upaya Masyarakat dalam Penanggulangan . *Jurnal PKS*, Vol 14 No 4.
- Mustopadijaja, A. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja .
- Nurhaimi, R. A. (2014). Kajian Pemahaman Masyarakat Terhadap Banjir Di Kelurahan Ulujami Jakarta. *Jurnal Teknik PWK*, Vol 3 No 2.
- Rahmadhani, A. d. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik . *Jurnal Publik*, Vol.11 No.1.
- Ramdhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol.11,No.01.
- Rasikin, P. (2017). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kecamatan Hulu Tengah. *Jurnal Pendidikan Geografi*. Vol.4, No.1. . *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol.4, No.1.
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten ,Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No.1.
- Santoso, H. D. (2019). Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Tingkat Kerentanan dengan Metode Ecodrainage Pada Ekosistem Karst di Duku Tungu Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul DIY. *Jurnal Geografi*, Vol 16 No 1.
- Saragih, A. (2016). Model Penanggulangan Bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Dalam Perspektif Politik Ekologi . *Jurnal Politika*, Vol.7 No.1. .
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta cv.
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik .
- Tayibnapi, Y. F. (2017). Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Penerbit Rineka Cipta. PT ASDI Mahwaya.

- Widayanto, A. (2018). Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Oleh Yonif Raider 303/SSM Guna Mewudkan Ketahanan Wilayah di Kabupaten Garut. *Jurnal Strategi dan Kampanye Militer*, Vol.4, No.3.
- Winarno, B. (2013). Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus, Cetakan pertama, Edisi dan Revisi Terbaru, Yogyakarta CAPS.
- Zakky. (2019). Pengertian Evaluasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum.